

Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Implementation of Participatory Based Planning In the Development of a Hanging Bridge in Air Merah Village, Labuhan Batu Selatan Legacy

Dinda Adelia

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

dindaadelia121@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of participatory-based planning in the construction of a suspension bridge in Air Merah Village, South Labuhan Batu Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. This study took as many as six people as resource persons. The data collection technique used in this research *is interviews*. *The results of this study indicate that the Implementation of Participatory-Based Planning in the Construction of a Suspension Bridge in Air Merah Village, Labuhan Batu Selatan Regency has not been fully implemented properly. Because the actions taken have not gone as expected, where the government does not carry out deliberation to make decisions for the construction of the suspension bridge. Therefore, the construction of this suspension bridge was not built as expected by the local community. In planning the suspension bridge construction, the community has not been fully involved, because in the socialization only the landowners are invited to participate. This causes problems in the community because the suspension bridge construction point is not in accordance with what the community needs and expects. Thus, the government is expected to be able to defend the rights of the people as much as possible in planning a development. The policy regarding the construction of suspension bridges has several points that are not implemented properly. The government is expected to carry out intensive socialization with the community to provide an understanding of each policy by prioritizing a win-win solution, meaning that every policy made by the government does not override the rights of the community.*

Keywords: Implementation, Participatory Planning, Suspension Bridge

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten LabuhanBatu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak enam orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten LabuhanBatu Selatan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena dalam tindakan yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana pemerintah tidak melakukan musyawarah pengambilan keputusan untuk pembangunan jembatan gantung. Oleh karena itu pembangunan jembatan gantung ini dibangun tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Dalam perencanaan pembangunan jembatan gantung masyarakat

belum sepenuhnya ikut dilibatkan, karena dalam sosialisasi hanya masyarakat pemilik tanah saja yang diundang untuk ikut serta. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah dalam masyarakat karena titik pembangunan jembatan gantung tidak sesuai dengan yang masyarakat butuhkan dan harapkan. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat membela hak rakyat semaksimal mungkin dalam merencanakan suatu pembangunan. Kebijakan mengenai pembangunan jembatan gantung terdapat beberapa point yang tidak terlaksana dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara intensif dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang setiap kebijakan dengan mengutamakan *win win solution* artinya disetiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Perencanaan Partisipatif, Jembatan Gantung

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Untuk menunjang perkembangan, dibutuhkan partisipasi dari setiap elemen masyarakat. Masyarakat pedesaan sangat diharapkan dapat membantu perkembangan bangsa. Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah pusat merupakan pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia secara sentralistik. Dimana pemerintah pusat lah yang memegang kendali, pemrakarsa, pelaksana, dan perencana tunggal dalam proses pembangunan Negara, Sedangkan daerah hanya sebagai objek dari pada pembangunan itu. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan suatu wilayah merupakan hal yang penting terhadap perkembangan suatu wilayah. Seberapapun besar potensi suatu wilayah jika tidak ada pembangunan wilayah tersebut tidak akan tersentuh dengan yang namanya perkembangan dan kemajuan. Desa Air Merah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melaksanakan pembangunan proyek jembatan gantung, dimana secara formalitas masyarakat berpartisipasi dalam proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) masyarakat berpendapat bahwa mekanisme proyek pembangunan jembatan gantung yang mengikutsertakan masyarakat dapat bermanfaat untuk memberikan masukan mengenai permasalahan yang terdapat di daerah tersebut. Sehingga memunculkan pertanyaan , apakah partisipasi masyarakat sudah sebagai subjek pembangunan dan bukan lagi merupakan objek pembangunan sesuai dengan model "*bottom-up*", dan apakah selama pelaksanaan Musrenbang hanya sekedar rutinitas dari system yang harus atau wajib dilaksanakan atau musrenbang telah menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat. Dasar dalam penentuan kebijakan juga akan

diperoleh dari partisipasi masyarakat sehingga terciptanya hubungan partisipasi vertikal antara masyarakat dengan pemerintah yang merupakan implementasi partisipasi dalam proses administrasi, Seperti yang Seperti yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No 4 tahun 2017 pasal 82 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2017- 2037 dimana masyarakat dapat mengetahui secara terbuka informasi dalam bentuk dokumen dan peta RTRW maupun produk turunannya, menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang mengajukan keberatan kepada pemerintah kabupaten terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten, mengajukan keberatan kepada pemerintah kabupaten terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut Kartiwa (2015:21), Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. Menurut Kartiwa (2015:30), Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan kemudian dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori. Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Maret-Juni 2022 di Kantor Desa Air Merah dan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten LabuhanBatu Selatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Adanya Tujuan Akhir Yang Dikehendaki dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Tujuan dari pembangunan di desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa sangat identik dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membangun manusia indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat indonesia. Diketahui bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal, dapat diketahui tujuan akhir dari pembangunan

jembatan gantung ini belum terpenuhi keseluruhan karena untuk mensejahterakan masyarakat pemerintah harus mendengarkan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di desa mereka. Menurut Jehan Ridho Izharsyah & Faizal Hamzah Lubis (2020) negara memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penata ruang. Penata ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Adanya Sasaran-Sasaran dan Prioritas Untuk Mewujudkan Pembangunan Jembatan Gantung

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah. Sasaran dan prioritas ini diselenggarakan oleh SKPD yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung capaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat pelayanan minimal. Sasaran dan prioritas yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya pembangunan jembatan gantung ini guna mempermudah dan membantu masyarakat dalam menjalani aktifitas perjalanan yang harus melakukan perjalanan antar desa. Tetapi masyarakat merasa sasaran tidak tepat karena titik pembangunan jembatan gantung ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut (Wijaya, 2015) Di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang menentukan besarnya pengaruh suatu program, yaitu: (a) Kelompok yang memberi izin, adalah suatu lembaga yang membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program disebarluaskan. (b) Kelompok pendukung, ialah kelompok yang mendukung dan setuju pada program yang dilaksanakan. (c) kelompok oposisi, ialah mereka yang menentang atau kelompok yang bertentangan dengan ide perubahan yang ingin dilaksanakan. (d) Kelompok evaluasi, ialah mereka yang terdiri dari orang-orang yang mengkritik dan memonitor jalannya suatu program. Dengan mengetahui kelompok dalam masyarakat ini, seorang perencana pembangunan dapat memprediksi dan mengantisipasi, serta menyesuaikan program-program pembangunan yang akan dilakukannya.

c. Adanya Jangka Waktu dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Sesuai dengan UU NO 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 79 bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi: rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) untuk jangka waktu 6 tahun

dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung di desa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal, dapat diketahui prioritas yang pemerintah lakukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan mempermudah aktivitas masyarakat yang melakukan aktifitas perjalanan antar desa. Tetapi sasaran pembangunan jembatan gantung ini menimbulkan konflik didalam masyarakat karena masyarakat merasa keluhan dan apa yang mereka butuhkan tidak didengar oleh pemerintah.

d. Adanya Modal dan Sumber Daya Yang Akan Digunakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Modal sosial merupakan potensi sumber daya pembangunan, karena modal sosial menghasilkan. Suatu bentuk kerjasama antar warga desa yang diwujudkan melalui kegiatan gotong royong dan keswadayaan masyarakat. Keterbatasan sumber dana pembangunan desa bukan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa. bahwa sumber modal didapat langsung dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan sebuah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan sumber daya dalam pembangunan jembatan gantung ini berasal dari masyarakat setempat yang memberikan hibah tanah dan tenaga gotong royong untuk membantu berjalannya proses pembangunan jembatan gantung ini. Menurut (Ikhsan, 2015), Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut sumber daya, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

e. Adanya Kebijakan-Kebijakan Untuk Melaksanakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan sebuah program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. kebijakan-kebijakan yang dibuat berguna untuk kesuksesan pembangunan jembatan gantung ini. Tetapi ada poin dari kebijakan yang dibuat tidak terlaksana sehingga membuat masyarakat merasa kecewa yang pada ujungnya membuat masyarakat melakukan protes atas kebijakan tersebut.

Menurut Mahardika & Rizki (2021) implementasi menyangkut semua upaya yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan kedalam tindakan yang nyata, terencana, sistematis, dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Menurut Abdul Wahab (2008), mengemukakan beberapa pedoman kebijakan sebagai berikut: Pertama, Kebijakan harus dibedakan dari keputusan Kedua, Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dengan administrasi Ketiga, Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan Keempat, Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan dan adanya tindakan Kelima, Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir Keenam, Kebijakan memiliki tujuan dan sasaran tertentu Ketujuh, Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu Kedelapan, Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat antar organisasi dan intra organisasi Kesembilan, Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga pemerintah dan yang terakhir Kesepuluh, Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan

f. Adanya Orang, Organisasi, atau Badan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Menurut (Yustika, 2013) Kelembagaan merupakan sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Lembaga ini memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan perencanaan pembangunan dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Badan perencanaan pembangunan ini memiliki tugas penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud badan pembangunan menyelenggarakan fungsi. bahwa badan yang melaksanakan pembangunan jembatan gantung ini merupakan dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tidak ada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang lain yang ikut andil dalam proses pembangunan jembatan gantung ini.

g. Adanya Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaannya dalam Proyek Pembangunan Jembatan Gantung

Manurut (Rohayati, 2014), pemantauan merupakan suatu tindakan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tinggi dilakukan agar membuat pengukuran waktu yang menunjukkan pergerakan arah tujuan atau menjauh dari itu.

Menurut Raianda (2015) evaluasi tidak hanya menampilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan serta membantu dalam penyelesaian dan perumusan kembali masalah.

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di dalam desa. Kontrol sosial akan berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa. proses pengevaluasian, pengawasan, dan pemantauan dilakukan dengan sangat baik guna mencegah terjadinya masalah atau hal hal yang tidak diinginkan selama proses pembangunan jembatan gantung.

h. Adanya Partisipasi dalam Proyek Pembangunan Jembatan Gantung

Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa. Dengan terlibatnya masyarakat desa akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif akan dilakukan dengan tahap Pertama, Sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk bekerjasama Kedua, Identifikasi data masalah dan potensi desa Ketiga, Analisi data dan potensi masalah Keempat, Menyusun program dan kegiatan , Kelima Menentukan skala prioritas program kegiatan. Peran masyarakat sangat penting dalam hal ini karena dengan diikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah akan mendengar apa yang sedang di keluhkan dan di butuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan di desanya. Sehingga tidak terjadinya konflik-konflik yang menimbulkan masalah yang dapat menghambat proses pembangunan. Menurut pendapat dari Suryono (2001) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Ida Martinelli dkk (2021) partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada didalam suatu kelompok masyarakat.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jembatan gantung memiliki tujuan akhir yaitu jembatan gantung yang dibangun antar desa air merah dengan desa lubuk panjang. Tetapi tujuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Pembangunan jembatan gantung yang masyarakat inginkan ialah pembangunan jembatan antar desa air merah dengan desa teluk panji. Sasaran dan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar terwujudnya pembangunan jembatan gantung yang dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam menjalani aktifitas perjalanan yang harus melakukan perjalanan antar desa. Tetapi masyarakat merasa sasaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat karena titik pembangunan jembatan gantung tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Jangka waktu yang ditetapkan dalam pembangunan jembatan gantung ini kurang lebih 3 tahun dan dari jangka waktu selama 3 tahun itu merupakan waktu yang sangat efisien dan efektif untuk pembangunan jembatan gantung antar desa air merah dengan desa lubuk panjang. Sehingga jembatan ini dapat digunakan secepat mungkin oleh masyarakat untuk menjalankan aktifitas yang harus melakukan perjalanan antar desa. Sumber modal didapat langsung dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan sebuah dana yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan sumber daya dalam pembangunan jembatan gantung ini berasal dari masyarakat setempat yang memberikan hibah tanah dan tenaga kerja gotong royong untuk membantu berjalannya proses pembangunan jembatan gantung ini. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melancarkan proses pembangunan jembatan gantung ini. Tetapi ada poin dari kebijakan yang dibuat tidak terlaksana sehingga membuat masyarakat merasa kecewa yang pada ujungnya membuat masyarakat melakukan protes atas kebijakan tersebut. Badan yang melaksanakan pembangunan jembatan gantung ini merupakan dari dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tidak ada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang lain yang ikut andil dalam proses pembangunan jembatan gantung ini. Proses pengevaluasian, pengawasan, dan pemantauan dilakukan dengan baik guna mencegah terjadinya masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pembangunan jembatan gantung. Hal ini juga dilakukan agar waktu untuk pembangunan tidak terbuang sia-sia karena setiap minggunya ada laporan progres pembangunan jembatan gantung. Partisipasi pembangunan dilakukan oleh masyarakat. Tetapi hanya dalam partisipasi pembangunan jembatan gantung saja masyarakat ikut berpartisipasi seperti sumbangan tenaga kerja dan gotong royong pada saat pembangunan, tetapi masyarakat tidak

diikutsertakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada saat perencanaan pembangunan jembatan gantung.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang dan Kantor Desa Air Merah, Pembimbing saya Bapak Jehan Ridho Izharshyah S.Sos, M.Si serta seluruh pihak yang berperan dan membantu agar terlaksananya penelitian ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Erlis, Milta Rin Sondole dkk. 2015, *Pengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BbM Bitung*, Jurnal EMBA Vol 3, No 3 Februari 2015: 13-21
- Izharshyah, J. L., Ridho, & Hamzah, F. (2020). *Analysis of Master Plan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRI-Journal), Vol.3 No.4 November 2020: 2821-2834
- Kartiwa.(2015). *Birokrasi Pemerintah Daerah*. Pustaka Bangsa
- Mahardika, Ananda & Rafieqah Nalar Rizki. 2021, *Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 2 No. 2, Oktober 2021: 1647-1654
- Mertineli, Ida dkk. 2021, *Sosialisasi Mutu Lulusan Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu. Community Empowerment*. Vol. 6 No. 12, September 2021: 2303-2314
- Raianda, Ega. 2015, *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas*. Jurnal SI Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No.2 , Maret 2015: 1-14
- Rohayati, Mita. 2014, *Membangun Sistem Informasi Monitoring Data Inventory di Vio Hotel Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Februari 2014: 1-8
- Suryono, Yoyon. 2016, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kepintaran*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Vo.3 No 1, Maret 2016: 97-108
- Wijaya, Ida Suryani. 2015, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan*. Jurnal Lentera, Vol 18, No 1 Juni 2013: 53-61
- Yustika, Ahmad Erani. (2012). *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga